

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah atau yang di singkat UMKM menjadi kegiatan usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat Indonesia. Potensi sumber daya alam yang di miliki Indonesia membuka banyak peluang untuk melakukan kegiatan usaha, banyak dari pelaku usaha menggunakan hasil sumber daya alam dari daerahnya untuk diolah dan dijadikan barang bermanfaat yang bernilai jual, hal ini cukup memelopori terciptanya suatu usaha atau lebih spesifiknya usaha mikro kecil, dan menengah. Kegiatan usaha ini pun meliputi segala aspek yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Fleksibilitas dan kemampuan untuk dapat menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar, menjadikan UMKM memiliki kelebihan dan lebih mudah di lakukan karena sistem birokrasi dan struktur organisasi yang sederhana oleh karena UMKM memiliki tingkat potensi yang besar dalam pengembangannya serta memiliki peran yang amat penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menyerap tenaga kerja. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Perkembangan UMKM Sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah 2022) “Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 2 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional”. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah diakui dunia memainkan peran bukan hanya dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan sosial. Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia tidak pernah lepas dari dukungan dan campur tangan pemerintah, perbankan serta lembaga keuangan lainnya. Peningkatan UMKM sudah menjadi fokus pemerintah yang berdampak langsung pada setiap bentuk usaha, baik usaha berskala besar hingga berskala kecil, karena UMKM menjadi tumpuan hidup terbesar rakyat Indonesia Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha, mikro, kecil, dan menengah merupakan dasar hukum UMKM di Indonesia yang mengatur perlindungan dan pemeliharaan lingkungan, serta pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Lalu pada tanggal 2 Februari ditetapkannya PP Nomor 7 Tahun 2021 yang menjadikan UU Nomor 20 Tahun 2008 menjadi dasar dibentuknya, PP Nomor 7 tahun 2021 mengatur mengenai antara kemudahan, perlindungan,

dan pemberdayaan koperasi; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM; penyelenggaraan inkubasi; dan dana alokasi khusus; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Dengan adanya peraturan dan undang-undang yang belaku tersebut, diharapkan UMKM mendapatkan perlindungan keadilan usaha dan mampu meningkatkan perannya dalam meningkatkan perekonomian dan memberantas kemiskinan di Indonesia. 3 Dibalik perkembangan UMKM di Indonesia yang cukup pesat, kurangnya pemahaman para pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan masih menjadi masalah mendasar bagi banyak pelaku UMKM di Indonesia. Menurut Ariesta & Nurhidayah (2020), UMKM memiliki masalah dalam menyusun laporan keuangan, yaitu terbatasnya pemikiran tentang mengelola laporan keuangan dan terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai dalam menyusun laporan keuangan. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyusun Standar akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) sebagai upaya mendukung perekonomian Indonesia. SAK-EMKM memuat pengaturan akuntansi yang lebih sederhana karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis. Maka dari itu, pemerintah mengharapkan dengan adanya SAK-EMKM ini, para pelaku EMKM bisa menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang lebih baik lagi dan juga lebih sederhana untuk memudahkan proses bisnis yang terjadi. Kemajuan UMKM turut didukung oleh sehatnya keuangan UMKM. Sehat atau tidaknya keuangan UMKM dapat tercermin dari laporan keuangan UMKM tersebut. Untuk memastikan laporan keuangan UMKM mampu memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, UMKM wajib menggunakan standar pembuatan laporan keuangan khusus UMKM yang disebut SAK EMKM. 4 Laporan keuangan dalam suatu unit usaha merupakan hal yang sangat penting. Adanya laporan keuangan dapat menunjukkan kondisi keuangan dari badan usaha tersebut. Laporan keuangan menjadi bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Menurut Azizah Rachmanti et al., (2019) dalam penelitiannya, tidak adanya laporan keuangan pada UMKM Batik Jumput Dahlia, belum mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku untuk EMKM. Hal ini dilihat dari bukti pencatatan yang dilakukan yakni hanya mencatat keluar masuknya kas, serta tidak mencatat seluruh aset yang dimiliki. Hasil penelitian Rahadiansyah (2018) dalam penyajian laporan keuangan pada UMKM keripik tempe rohani sanan kota malang dapat diketahui bahwa dalam proses pencatatan yang di lakukan kripik tempe rohani tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan. Pada praktiknya masih banyak UMKM yang masih terhambat dalam penyusunan laporan keuangan

yang masih belum memadai, para pelaku UMKM juga masih menerapkan cara sederhana dalam pencatatan laporan keuangan, kurangnya sosialisasi terkait SAK-EMKM serta rendahnya pemahaman para pelaku UMKM terhadap penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku menjadi penyebab sulitnya para pelaku UMKM untuk membuat dan mengolah laporan keuangan. Perlunya penyusunan laporan keuangan menggunakan SAK-EMKM bagi pelaku UMKM sebenarnya bukan hanya untuk kemudahan memperoleh akses modal dari lembaga keuangan, tetapi juga untuk mendapatkan hasil yang lebih signifikan baik dalam pengendalian aset, kewajiban, dan modal, serta perencanaan pendapatan dan efisiensi biaya-biaya yang terjadi, yang pada akhirnya sebagai alat untuk pengambilan keputusan ekonomis dalam pengelolaan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah. Adapun objek penelitian ini adalah Pabrik Tahu ZR yang berlokasi di Jalan Serbaguna, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Pabrik ini bergerak pada bidang pengolahan pangan dan bahan baku kedelai menjadi tahu. Pada Pabrik Tahu ZR tersebut pemilik usaha belum dapat menyusun dan mengelompokkan transaksi-transaksi pada masing-masing laporan keuangan sesuai SAK-EMKM. Berdasarkan riset pendahuluan yang di dapatkan dari pemilik Pabrik Tahu ZR, bahwa belum menerapkan SAK-EMKM. Pemilik usaha melakukan pencatatan laporan keuangan dengan model konvensional dimana pencatatan hingga pengolahan laporan keuangan hanya berlandaskan pemahaman pribadi. Keterbatasan pengetahuan serta minimnya sosialisasi yang di peroleh pemilik usaha terhadap penerapan SAK-EMKM dalam penyusunan laporan keuangan menimbulkan batasan bagi pemilik usaha, baik dalam mengetahui kondisi keuangan, keterbatasan literasi keuangan hingga pengurusan peminjaman modal pada masa mendatang. Keterbatasan tersebut dapat sangat berpengaruh bagi perkembangan usaha kedepannya. Dilihat dari kondisi ini dimana sebelumnya pemilik usaha belum menerapkan SAK-EMKM, maka diperlukannya penyusunan laporan keuangan serta pengelompokan transaksi-transaksi yang sesuai dengan SAK-EMKM pada periode Tahun 2022. Penerapan standar akuntansi yang sesuai dapat membantu pemilik Pabrik Tahu ZR, penerapan standar akuntansi yang sesuai tidak hanya memberikan benefit bagi pemilik pabrik baik dalam pengurusan peminjaman modal usaha pada masa mendatang, tetapi juga dengan adanya penerapan SAK-EMKM juga dapat meningkatkan pemahaman pemilik usaha dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi serta dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif sehingga memberikan kemudahan bagi pemilik Pabrik Tahu ZR dalam menganalisis kinerja keuangannya. Berdasarkan latarbelakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada UMKM Pabrik Tahu ZR dengan judul; “Penerapan SAK-EMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Pabrik Tahu ZR Desa Helvetia”

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan

latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) pada penyusunan laporan keuangan pada Pabrik Tahu ZR untuk periode Tahun 2022? 1.3 Ruang Lingkup/Batasan Masalah Penelitian ini hanya mengkaji/ menjelaskan mengenai bagaimana penyusunan laporan keuangan sesuai dengan data yang di peroleh untuk periode Tahun 2022 dan mengelompokan pada masing-masing laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. 7 1.4 Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (SAK-EMKM) pada penyusunan laporan keuangan pada Pabrik Tahu ZR untuk periode Tahun 2022 1.5 Manfaat Penelitian Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain: 1.5.1 Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam ilmu pengetahuan di bidang akuntansi tentang penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). 1.5.2 Manfaat Praktis 1. Bagi peneliti Sebagai pengaplikasian ilmu yang telah peneliti peroleh di bangku perkuliahan dan menambah wawasan peneliti dengan mengetahui kesesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK- EMKM. 2. Bagi Pemilik UMKM Hasil penelitian sebagai sumbangsi pemikiran serta bahan acuan bagi pemilik Pabrik Tahu ZR dalam penerapan standar dalam penyusunan laporan keuangan agar semakin baik untuk peningkatan literasi keuangan serta perkembangan usaha kedepannya

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Standar Akuntansi Keuangan Entitas, Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK-EMKM) Standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia disebut dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). SAK adalah standar praktik yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Pada tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI), telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang juga diintensifikan untuk digunakan oleh entitas kecil dan menengah, namun, seiring perkembangannya, terdapat kebutuhan mengenai ketersediaan standar akuntansi yang lebih sederhana karena keterbatasan sumber daya manusia. Dari kebutuhan serta keterbatasan tersebut, Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (ED SAK-EMKM) dalam rapatnya pada tanggal 18 Mei 2016 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya. Standar Akuntansi Keuangan (SAK EMKM) disahkan oleh anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia pada 24 Oktober 2016 serta berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Menurut buku SAK-EMKM 2018, entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama 2 tahun berturut-turut. Pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) memuat pengaturan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM. Dasar penegukurannya murni menggunakan biaya historis sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehannya. SAK-EMKM memudahkan pemilik usaha/pelaku usaha entitas mikro, kecil dan menengah dalam penyusunan laporan keuangan dan menyajikan informasi keuangan yang lebih baik lagi.

2.1.2 Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil, Dan Menengah (SAK-EMKM) Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan keuangan dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter suatu entitas pada waktu atau

periode akuntansi. Kesatuan sistem informasi akuntansi yang melalui proses pengklasifikasian, pencatatan, pengikhtisaran akan menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi dasar informasi untuk menyusun dan mengevaluasi mengenai berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan pada periode 10 yang telah lalu serta untuk menyusun perencanaan dan menentukan arah kegiatan perusahaan dimasa yang akan datang. Menurut Ahriani dalam (Setiyawan, 2017), Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, serta ringkasan dari transaksi keuangan yang disusun untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan dibuat oleh bagian akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak manajemen dan pihak perusahaan. Menurut hery dalam (Zulmi et al. 2018), Laporan Keuangan (Financial Statements) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan mengikhtisarkan data transaksi bisnis. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk Transaksi Neraca Saldo Setelah Penyesuaian Laporan keuangan Jurnal Penutupan NS Setelah Penutupan Jurnal Pembalik Jurnal Penyesuaian Neraca Saldo Posting Buku Besar Jurnal Gambar 2.1 Siklus Akuntansi 11 mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sesuai yang tercantum pada buku Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK-EMKM), laporan keuangan UMKM minimum ialah: 1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Pos-pos yang mencakup laporan posisi keuangan ialah: a. Kas dan setara kas b. Piutang c. Persediaan d. Aset tetap e. Utang usaha f. Utang bank g. Ekuitas SAK-EMKM tidak menentukan format atau urutan terhadap akun-`akun yang disajikan. Meskipun demikian, entitas dapat menyajikan akun-akun aset berdasarkan urutan likuiditas dan akun-akun liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo. 2. Laporan laba rugi Sesuai pada buku Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah (SAK-EMKM) pada bab 5 menjelaskan bahwa laporna laba rugi mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi yang merupakan kinerja keuangan entitas untuk suatu periode. Laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun sebagai berikut: a. Pendapatan b. Beban keuangan c. Beban pajak Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali SAK-EMKM mensyaratkan lain. SAK-EMKM mengatur perlakuan atas dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan. 3. Catatan atas laporan keuangan

Menurut SAK-EMKM 2018, Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap akun dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. catatan atas laporan keuangan memuat: a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK-EMKM b. Ikhtisar kebijakan akuntansi c. Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. 13 Laporan keuangan memiliki peran yang penting bagi perusahaan. Laporan keuangan menunjukkan kinerja keuangan perusahaan/badan usaha dalam menghasilkan pendapatan, serta memberi informasi sehubungan dengan posisi keuangan perusahaan. Pada SAK-EMKM (2018), tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna tersebut meliputi penyediaan sumber daya bagi entitas seperti kreditor maupun investor. Laporan keuangan dipergunakan oleh manajemen puncak dalam mengambil keputusan yang bermanfaat bagi perkembangan perusahaan. Pada ED PSAK revisi 2015, Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Penerapan SAK, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Menurut SAK-EMKM 2018, bagian 3.3 menyatakan bahwa: penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan:

14 a. Relevan: informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk memproses pengambilan keputusan. b. Representasi tepat: informasi dalam laporan keuangan mempresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan dan bebas dari kesalahan material dan bias. c. Keterbandingan: informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antara entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan. d. Keterpahaman: informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Menurut Sofyan dalam (Ramanda,

2018) menyatakan bahwa karakteristik kualitas laporan keuangan dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga lebih bermanfaat bagi para pengguna. Adapun karakteristik kualitas laporan keuangan yaitu: dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, penyajian jujur, substansi mengungguli form (dokumen), netralitas, pertimbangan sehat (prudence), kelengkapan, dapat dibandingkan. 15

2.1.3 Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil atau pun rumah tangga. usaha yang berperan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi tercipta lapangan kerja maupun dari sisi jumlah usahanya. UMKM menjadi kegiatan usaha yang memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi serta dapat memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dan dari pada itu terdapat prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM ialah:

1. Prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah: a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan; c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah; d. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; 16 e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.
2. Tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah: a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut UU No 20 Tahun 2008 yang telah diperbaharui kembali pada PP Nomor 7 Tahun 2021 Bab III pasal 35 menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha terdiri atas: a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000

(satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

17 c. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:

- Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
- Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).
- Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2008 pada Bab I, ketentuan umum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ialah:

- Usaha Mikro Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- Usaha Kecil Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- Usaha Menengah Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- Usaha Besar Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah dikategorikan berdasarkan jenis produk atau jasa yang dihasilkan, maupun aktivitas yang dilakukan oleh suatu usaha, serta mengacu pada kriteria UMKM yaitu

- Usaha jasa Suatu jenis kegiatan usaha untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang jasa, termasuk usaha jasa misalnya jasa angkutan, jasa akuntan, warung telepon, jasa dokter, jasa rumah sakit, bioskop, siaran televisi dan radio, dan sebagainya.
- Usaha dagang Suatu jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh pedagang dengan aktivitas yang berupa membeli barang dagangan untuk dijual kembali dengan maksud untuk memperoleh

keuntungan, sebagai contoh adalah warung di kampung, toko di dekat pasar, toko serba ada, koperasi serba ada (waserda), dan sebagainya.

3. Usaha industri (termasuk kerajinan rakyat) Kegiatan usaha yang mengubah bentuk dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap dipakai, misalnya pabrik sepeda, pabrik sepatu, pabrik tahu, kerajinan anyaman topi, konveksi, kerajinan tanah liat, dan sebagainya.

4. Usaha pertanian, peternakan, dan perikanan Kegiatan produksi yang berupa mengembangbiakkan tanaman dan hewan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan.

5. Usaha pertambangan dan galian Kegiatan untuk mengangkat bahan-bahan dari dalam atau dari permukaan tanah agar dapat diproses lebih lanjut.

Sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku usaha yang bersangkutan di dalam menjalankan bisnisnya merupakan 20 karakteristik yang di miliki UMKM, karakteristik ini menjadi ciri pembeda antara pelaku usaha sesuai dengan skala usaha.

Pada Buku UMKM dan bentuk-bentuk usaha (2018), Berdasarkan perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok yaitu:

1. Livelihood Activities, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal, contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. Micro Enterprise merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. Small Dynamic Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. Fast Moving Enterprise, merupakan UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB). Meskipun memiliki peran yang besar dalam perekonomian Indonesia, kegiatan UMKM tidak sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan adanya hambatan yang di alami oleh pelaku UMKM. Adapun kendala yang sering muncul dalam UMKM yaitu sebagai berikut:

- a. Akses modal dan pembiayaan usaha yang kurang, manajemen bisnis UMKM yang masih di kelola secara manual dan tradisional secara khusus manajemen keuangan serta belum mempunyai sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik.
- b. Kurangnya sumber daya manusia baik dalam pengetahuan mengenai teknologi, kemampuan membaca kebutuhan pasar, tidak menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran.
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait alat-alat teknologi, keterbatasan akses terhadap bahan baku, belum dapat mengimbangi selera konsumen, serta persaingan dengan kompetitor yang bermodal besar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian terdahulu

No Nama Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil

1 Immu Puteri Sari, Fitri Yulianis, Rambun Pamena (2022) Penyusunan Laporan Keuangan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah Berdasarkan SAK-EMKM Pada Usaha Karak Kaliang Marisa Metode Kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sistem pencatatan keuangan pada Usaha Karak

Kaliang Marisa dicatat secara manual dan masih sangat sederhana, dikarenakan pemilik masih belum memahami cara menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM 2 Rahadiansyah 2018 Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK Metode Kualitatif Hasil analisis penerapan standar akuntansi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dalam 22 EMKM) pada UMKM Keripik Tempe Rohani Sanan Kota Malang penyajian laporan keuangan pada UMKM keripik tempe Rohani Sanan Kota Malang dapat diketahui bahwa dalam proses pencatatan yang dilakukan Keripik Tempe Rohani tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan, 3 Firyal Muti' ah (2021) Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (SKA EMKM) Pada UMKM Pengolahan Ikan Mbak Noors Metode Kualitatif Penyusunan laporan keuangan pada umkm pengolahan ikan mbak noors belum sesuai dengan SAK-EMKM 4 Nadia Auliana Umami, Rivani Cania (20220) Penerapan SAKEMKM dalam Penyusunan Laporan keuangan pada UMKM Super Sedap di Kabupaten Sukabumi Metode Kualitatif UMKM yang bergerak dalam bidang produksi makanan tradisional, hasil penelitian pencatatan laporan keuangan menunjukkan adanya perbedaan laba bersih sebelum dan sesudah penerapan pencatatan keuangan yang memenuhi SAK-EMKM 23 2.3 Kerangka Berpikir SAK-EMKM telah dirancang sebagai standar penyajian laporan keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Penyajian laporan keuangan yang baik menjadi hal penting bagi para pemilik UMKM, namun masih terdapat pelaku UMKM yang laporan keuangan usahanya belum mengacu pada SAK-EMKM. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penerapan SAK-EMKM pada laporan keuangan Pabrik Tahu ZR. Laporan keuangan SAK-EMKM meliputi, laporan posisi keuangan, Laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan. Pada gambar 2.1 dikemukakan kerangka berpikir: Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) Penerapana SAK-EMKM pada Laporan keuangan Pabrik Tahu ZR Gambar 2.3 Kerangka Berpikir Pencatatan dan penyusunan laporan keuangan Pabrik tahu ZR belum mengacu pada SAK-EMKM Kesimpulan Sumber: Didesain Penulis

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Lama Penelitian 1. Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan pada Pabrik Tahu ZR yang beralamatkan pada di Jalan Serbaguna Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. 2. Waktu Penelitian Penelitian dilakukan pada awal bulan Januari 2023 hingga selesainya penelitian yang dilakukan oleh peneliti 3.2 Data dan Teknik Pengumpulan Data 3.2.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Pemilik Pabrik Tahu ZR yang berada di Jalan Serbaguna, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. 3.2.2 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi ialah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi baik dari dokumen atau catatan berupa laporan, gambar maupun elektronik, baik berupa angka ataupun keterangan yang mendukung penelitian. Dalam penelitian ini `25 dokument yang dikumpulkan berupa laporan keuangan yang terdapat pada Pabrik Tahu ZR. 3.3 Teknik Analisis Data Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu: 1. Analisis deskriptif Analisis deskriptif ialah teknik analisis data yang bertujuan mengumpulkan, memberikan deskripsi, menggambarkan dan menyajikan data dalam bentuk teratur sehingga memberikan informasi yang berguna dimana peneliti menyusun laporan keuangan sesuai dengan data yang ada pada periode Tahun 2022 serta mengelompokannya pada laporan posisi keuangan, laba rugi dan unturnya akan di jabarkan ke dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sesuai dengan SAK-EMKM. 2. Komparatif Komparatif adalah pengamatan dengan membandingkan antara dua atau lebih hal serupa untuk memperoleh persamaan dan perbedaan. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan antara pencatatan keuangan yang disusun oleh pemilik Pabrik Tahu ZR dengan laporan keuangan yang di susun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas, Mikro, Kecil, dan Mengengah (SAK-EMKM).